

ANALISIS PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG) DENGAN MENGGUNAKAN APLIKASI SIMBG DI DINAS PUPR KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2022

¹Agus Candra, ²Surya Adinata

Program Studi Perencanaan wilayah dan kota serta Program Studi teknik Sipil, Fakultas teknik Universitas Islam kuantan Singin. Jl.Gatot Soebroto KM 7 Kebun Nenas Jake, Kota Teluk Kuantan, Kabupaten g. Jl Kuantan Singingi, Provinsi Riau

Email: aguscandra_lingkungan@yahoo.com, mastersuryaadinata@gmail.com

Abstrak

Bangunan gedung merupakan wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memuat pengaturan mengenai fungsi bangunan gedung. Penelitian ini bertujuan untuk Menganalisis Persetujuan bangunan Gedung (PBG) dengan menggunakan aplikasi SIMBG di Dinas PUPR Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2022.

Dari Hasil Penelitian dinas PUPR Kabupaten Kuantan Singingi Telah Mengeluarkan rekomendasi Persetujuan Bangunan Gedung dengan menggunakan aplikasi SIMBG pada tahun 2022 sebanyak 94 rekomendasi PBG dengan rincian di bulan Maret 5 PBG, bulan April 29 PBG, bulan Mei 5 PBG, bulan Juni 11 PBG, bulan Juli 5 PBG, bulan Agustus 16, bulan September 4 PBG, bulan Oktober 7 PBG, bulan Nopember 6 PBG, bulan Desember 5 PBG.

Kata Kunci: Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Aplikasi SIMBG

Abstract

Buildings are physical forms resulting from construction work that are integrated with their domicile, partly or wholly located above and/or in the ground and/or water, which function as places for humans to carry out their activities, whether for housing or living quarters, religious activities, activities business, social, cultural and special activities. Law Number 28 of 2002 concerning Buildings as last amended by Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation contains arrangements regarding the function of buildings. This study aims to analyze building approvals (PBG) using the SIMBG application at the PUPR Office of Kuantan Singingi Regency in 2022.

From the research results, the PUPR service for Kuantan Singingi Regency has issued recommendations for building approvals using the SIMBG application in 2022 as many as 94 PBG recommendations with details for March 5 PBG, April 29 PBG, May 5 PBG, June 11 PBG, July 5 PBG, August 16, September 4 PBG, October 7 PBG, November 6 PBG, December 5 PBG

Keywords: Building Approval (PBG), SIMBG Application

1. PENDAHULUAN

Bangunan gedung merupakan wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta

Kerja memuat pengaturan mengenai fungsi bangunan gedung, persyaratan bangunan gedung, penyelenggaraan bangunan gedung, termasuk hak dan kewajiban pemilik dan pengguna bangunan gedung pada setiap tahap penyelenggaraan bangunan gedung, ketentuan tentang peran masyarakat dan pembinaan oleh pemerintah, sanksi, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup. Keseluruhan maksud dan tujuan pengaturan tersebut dilandasi oleh asas kemanfaatan, keselamatan, keseimbangan, dan keserasian bangunan gedung dengan lingkungannya, bagi kepentingan masyarakat yang berperikemanusiaan dan berkeadilan. Implementasi undang-undang tersebut baik oleh pemerintah ataupun oleh masyarakat diharapkan dapat meningkatkan pelaksanaan tata pemerintahan yang baik, sekaligus dapat memberikan jaminan keamanan, keselamatan, dan kesehatan masyarakat dalam menyelenggarakan bangunan gedung. Berkaitan dengan hal tersebut, peran aktif pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah sangat penting untuk perbaikan layanan pemerintah, sekaligus untuk terus mendorong, memberdayakan, dan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk dapat memenuhi ketentuan dalam undang-undang tersebut secara bertahap.

Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung tersebut bukan hanya dalam rangka pembangunan dan pemanfaatan bangunan gedung untuk kepentingan mereka sendiri, tetapi juga dalam meningkatkan pemenuhan persyaratan bangunan gedung dan tertib penyelenggaraan bangunan gedung pada umumnya. Pelaksanaan undang-undang tersebut diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Beberapa perubahan ketentuan mengenai bangunan gedung dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja termuat dalam Bab III Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha Pasal 24 yang dijabarkan dalam 44 poin.

Berdasarkan peraturan pemerintah sebelumnya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, IMB didefinisikan sebagai perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. Sementara itu, PBG berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2021 diartikan sebagai perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung. Berdasarkan kedua pengertian tersebut, dapat diidentifikasi bahwa PBG hanya mensyaratkan terpenuhinya standar teknis, sedangkan IMB mensyaratkan terpenuhinya syarat administratif dan syarat teknis. Penyederhanaan persyaratan perizinan tersebut dimaksudkan untuk mempermudah proses pengurusan perizinan, tetapi tetap menjamin keselamatan dan keamanan bagi masyarakat melalui layanan konsultasi dan pemeriksaan pemenuhan standar teknis yang secara rinci diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021.

1.1 Rumusan Masalah

Dari latar belakang dapat di rumus penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem aplikasi SIMBG dalam Penerbitan Persetujuan bangunan Gedung (PBG) di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2022
2. Berapa Jumlah PBG yang telah di Terbitkan di Kabupaten Kuantan Sinngingi selama tahun 2022

1.2 Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk Menganalisis sistem aplikasi SIMBG dalam Penerbitan Persetujuan bangunan Gedung (PBG) di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2022.
2. Untuk mengetahui Jumlah Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang telah di Terbitkan di Kabupaten Kuantan Singingi selama tahun 2022

2. TINJAUAN PUSTAKA

Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang berdampak pada penyempurnaan pengaturan terkait penyelenggaraan bangunan gedung, Pemerintah telah menyelesaikan Peraturan Pemerintah, diantaranya:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
Penyempurnaan pengaturan bertujuan untuk memberikan kemudahan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung sehingga dapat mendukung peningkatan investasi dan ekonomi.

2.1 Perubahan UU 28/2002 Menjadi UU 11/2020

1. Persyaratan teknis diubah menjadi Standar teknis yang diatur secara rinci guna menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan bagi masyarakat
2. IMB dihapus atau di ganti menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota dengan mengacu pada NSPK dari Pemerintah Pusat
3. Penyelenggaraan BG (penerbitan PBG, SLF, SBKBG dan RTB) harus dilaksanakan melalui SIMBG, sehingga menjamin keseragaman pelayanan standarisasi penerapan telnis di seluruh Indonesia
4. Bisnis proses penerbitan PBG yang lebih jelas dengan batas waktu yang terukur. Pemenuhan standar teknis melalui penggunaan penyedia jasa bersertifikat dalam setiap tahapan penyelenggaraan BG.
5. Fungsi Pengawasan oleh Pemerintah Daerah hadir melalui proses konsultasi bersama Tim Profesi Ahli (TPA) pada tahap penerbitan PBG dan mekanisme inspeksi pada tahap pembangunan BG

Pemerintah Pusat

- 1) Penyusunan dan penyebarluasan NSPK secara nasional;
- 2) Peningkatan kapasitas aparat Pemerintah Daerah dalam implementasi PP No.16/2021;
- 3) Penyiapan SIMBG;
- 4) Penyelenggaraan BGFK;
- 5) Pengawasan penerapan peraturan perundang-undangan melalui pemantauan dan evaluasi substansi teknis.

Pemerintah Daerah

- 1) Pembinaan Pemerintah Daerah Provinsi dilakukan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam bentuk pemberdayaan dan pengawasan penerapan peraturan perundang- undangan;
- 2) Pembinaan Pemerintah Daerah kab/kota berupa:

- 3) melakukan penyebarluasan NSPK kepada masyarakat;
- 4) peningkatan kapasitas aparat Pemerintah Daerah dan penyelenggara BG;
- 5) Pengawasan pelaksanaan NSPK penyelenggaraan BG melalui mekanisme PBG, SLF, SBKBG dan RTB menggunakan SIMBG

2.3 Manfaat SIMBG

1. Meningkatkan pelayanan penerbitan PBG dan SLF kepada masyarakat dengan pendekatan Sistem Online di Daerah Meningkatkan pelayanan penerbitan PBG dan SLF kepada masyarakat dengan pendekatan Sistem Online di Daerah
2. Melakukan standardisasi regulasi terkait penyelenggaraan bangunan gedung di Indonesia
3. Menyederhanakan dan mempermudah penerbitan PBG dan SLF sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2.4. Dalam penyelenggaraan BG, Pemerintah Daerah perlu menyiapkan:

Tim Profesi Ahli (TPA) Tim yang terdiri atas profesi ahli yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota untuk memberikan pertimbangan teknis dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung.

Tim Penilai Teknis (TPT) Tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri atas instansi terkait penyelenggara BG untuk memberikan pertimbangan teknis dalam proses penilaian dokumen rencana teknis BG dan RTB berupa rumah ringgal 1 lantai dengan luas paling banyak 72 m2 dan rumah tinggal tunggal 2 antai dengan luas paling banyak 90 m2, serta pemeriksaan dokumen permohonan SLF perpanjangan.

2.5 Dalam penyelenggaraan BG, Pemerintah Daerah perlu menyiapkan:

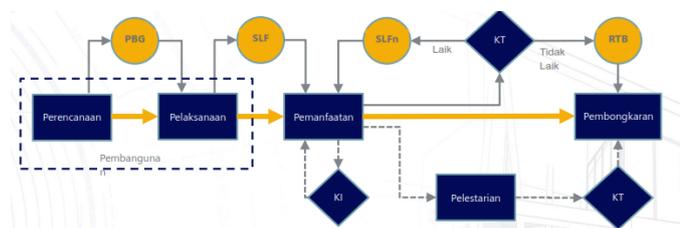
Sekretariat Tim atau perseorangan yang ditetapkan oleh kepala dinas teknis untuk mengelola pelaksanaan tugas TPA, TPT, dan Penilik Pengelola Teknis Bangunan Gedung, Tenaga teknis kementerian dan/atau organisasi perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam pembinaan BGN,yang ditugaskan untuk membantu kementerian/lembaga dan/atau organisasi perangkat daerah dalam pembangunan BGN.

Penyedia Jasa Pengkaji Teknis Pengkaji Teknis adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, yang mempunyai sertifikat kompetensi kerja kualifikasi ahli atau sertifikat badan usaha untuk melaksanakan pengkajian teknis atas kelaikan fungsi Bangunan Gedung. Penugasan Pengkaji Teknis dilakukan oleh Pemilik atau Pengguna melalui kontrak kerja.

2.6.Penyelenggaraan Bangunan Gedung

Sejak UU Cipta Kerja berlaku Izin Mendirikan Bangunan (“IMB”) diganti dengan Persetujuan Bangunan Gedung (“PBG”). Berdasarkan Pasal 1 angka 17 PP No. 16/2021, PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun bangunan baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung. Untuk IMB, izin diberikan apabila telah sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. Sedangkan, PBG diberikan apabila sudah sesuai dengan standar teknis bangunan gedung.

SLF harus diperoleh oleh Pemilik sebelum Bangunan Gedungdapat dimanfaatkan, Berikut adalah skema penyelenggaraan bangunan gedung.



Keterangan :

- PBG : Persetujuan Bangunan Gedung
- SLF : Sertifikat Laik Fungsi
- SLFn : Sertifikat Laik Fungsi (Perpanjangan)
- KI : Kajian Identifikasi
- KT : Kajian Teknis

2.7. Tata Cara Pengajuan PBG

Proses penerbitan PBG meliputi (i) konsultasi perencanaan, dan (ii) penerbitan PBG. PBG dapat diperoleh apabila dokumen rencana teknis telah diperiksa dan telah disetujui dalam proses konsultasi perencanaan. Berikut adalah uraian mengenai tata cara pengajuan PBG mengacu pada ketentuan pada PP No. 16/2021. Pendaftaran Konsultasi Perencanaan Pemilik Bangunan Gedung atau kuasanya (Pemohon), mendaftarkan melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) untuk dapat melakukan proses konsultasi perencanaan. Dokumen yang perlu disertakan untuk pendaftaran tersebut adalah:

- a. Data pemohon;
- b. Data bangunan gedung; data
- c. Dokumen rencana teknis.Konsultasi Perencanaan

Konsultasi Perencanaan melibatkan sekelompok penyedia jasa bangunan, termasuk termasuk penyedia jasa perencanaan konstruksi, penyedia jasa pelaksana konstruksi dan penyedia jasa pengawasan atau penyedia jasa manajemen konstruksi. Penyedia jasa perencana konstruksi tersebut akan menyiapkan rencana teknis yang kemudian akan disampaikan kepada pihak berwenang melalui SIMBG untuk permohonan PBG. Pemeriksaan Pemenuhan Standar Teknis Tenaga ahli atau teknis yang telah ditunjuk oleh pemerintah daerah akan memeriksa apakah dokumen yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi Standar Teknis atau tidak. 13 Tenaga ahli atau teknis tersebut terdiri atas 2 (dua) kelompok tergantung pada luas bangunannya.

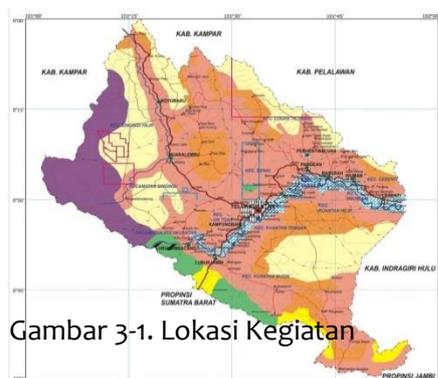
3. METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian meliputi langkah-langkah yang dilakukan dalam sebuah penelitian. Metodologi penelitian bertujuan agar penelitian bisa lebih terkonsep, terstruktur dan terarah, sehingga setiap tahapan akan dapat dilihat pencapaiannya sesuai dengan tujuan yang diharapkan terhadap penelitian tersebut.

Metode Penelitian Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan metode survey. Menurut Sugiyono (2012:29) metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas

3.1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Kuantan Singingi. Lokasi penelitian berada di Dinas PUPR Kabupaten Kuantan Singingi. Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi, maka diawali dengan kegiatan persiapan, selanjutnya kegiatan identifikasi (observasi lapangan). Di bawah ini Peta lokasi penelitian.



Gambar 3-1. Lokasi Kegiatan

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam Penelitian ini metode untuk mengumpulkan data digunakan adalah

3.1.1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh oleh peneliti secara langsung dari sumber data seperti Survei Lapangan, dan Photo dokumentasi.

3.1.2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari berbagai sumber yang telah ada seperti dari Dinas PUPR kabupaten Kuantan Singingi.

4 . HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada Bulan April tahun 2022 dinas PUPR kabupaten kuantan singingi merokemendasikan Persetujuan Bangunan Gedung(PBG) dengan menggunakan aplikasi SIMBG dengan Jumlah 29 PBG, dengan rincian 24 PBG berada di Kecamatan kuantan tengah,3 PBG di Kecamatan Singingi, 1 PBG di Kecamatan Kuantan Mudik dan 1 PBG di Kecamatan Cerenti.

Tabel Rekapitulasi Persetujuan bangunan Gedung (PBG) bulan Mei Tahun 2022

N o	LOKASI	RETRIBUSI (RP)	NOMOR DAN TANGGAL PBG
1	1	2	3
1	Jl. Ahmad Yani kelurahan simpang tiga Desa simpang tiga Kecamatan Kuantan Tengah	Rp.8.414.653,00	PBG-140902-09092022-01 09 SEPTEMBER 2022
2	Jl. Poros Desa Seberang Cengar Kecamatan Kuantan Mudik	Rp.9.340.650,00	PBG-140901-26092022-01 26 SEPTEMBER 2022
3	Jl. Simpang Tiga Air Emas Desa Air Emas Kecamatan Singingi	Rp. 429.962,00	PBG-140903-05042022-01 26 SEPTEMBER 2022
4	Jl. Jend Sudirman Desa Seberang Pantai Kecamatan Kuantan Mudik	Rp.9.922.027,00	PBG-140901-20092022-01 20 SEPTEMBER 2022

Sumber: Dinar PUPR Kabupaten Kuantan Singingi dan Hasil analisis 2022

Pada Bulan Mei tahun 2022 dinas PUPR kabupaten kuantan singingi merokemendasikan Persetujuan Bangunan Gedung(PBG) dengan menggunakan aplikasi SIMBG dengan Jumlah 4 PBG, dengan rincian 2 PBG berada di Kecamatan kuantan tengah,1 PBG di Kecamatan Singingi, 1 PBG di Kecamatan Kuantan Mudik.

Tabel Rekapitulasi Persetujuan bangunan Gedung (PBG) bulan Juni Tahun 2022

NO	LOKASI	RETRIBUSI (RP)	NOMOR DAN TANGGAL IMB
1	2	3	4

1	Jl. Perintis Kemerdekaan desa Simpang Tiga kecamatan kuantan Tengah	Rp.539.749,00	PBG-140902-17062022-01 17 JUNI 2022
2	Jl. Padang Bunut Lingkungan III RT.004/RW.001 Desa Sungai Jering Kecamatan Kuantan tengah	Rp 17.804.410,10	PBG-140902-28062022-01 28 JUNI 2022
3	Jalan lintas Taluk Kuantan - Pekanbaru KM. 6,5 Desa jake Kecamatan Kuantan Tengah	Rp -	PBG-140902-14062022-01 14 JUNI 2022
4	Jalan Barangan Desa Beringin Takuk Kecamatan kuantan Tengah	Rp -	PBG-140902-08062022-01 08 JUNI 2022
5	Jl. Simpang Barangan Desa Beringin Taluk kecamatan Kuantan Tengah	Rp -	PBG-140902-24052022-01 24 MEI 2022
6	Jl. Proklamasi desa Sungai jering Kecamatan kuantan tengah	Rp 10.192.297,00	PBG-140902-09062022-02 09 JUNI 2022
7	Jl. Ahmad Yani kelurahan simpang tiga Desa simpang tiga Kecamatan Kuantan Tengah	Rp 3.067.762,00	PBG-140902-15062022-01 15 JUNI 2022
8	Jl. Perintis Kemerdekaan desa Simpang Tiga kecamatan kuantan Tengah	Rp 19.012.950,00	PBG-140902-09062022-01 09 JUNI 2022
9	Jl. Rustam S Abrus Desa Sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah	Rp 441.248,00	PBG-140902-28062022-01 28 JUNI 2022
10	Jl. Rusdi S, Abrus Desa Sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah	Rp 9.203.287,00	PBG-140902-25052022-02 25 MEI 2022
11	Jl. Padang Bunut Lingkungan III Desa Sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah	Rp 9.838.937,00	PBG-140902-280622-01 28 JUNI 2022

Sumber: Dinar PUPR Kabupaten Kuantan Singingi dan Hasil analisis 2022

Pada Bulan Juni tahun 2022 dinas PUPR kabupaten kuantan singingi merokemendasikan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dengan menggunakan aplikasi SIMBG dengan Jumlah 11 PBG, dengan rincian 11 PBG berada di Kecamatan kuantan tengah.

Tabel Reputulasi Persetujuan bangunan Gedung (PBG) bulan Juli Tahun 2022

NO	LOKASI	RETRIBUSI (RP)	NOMOR DAN TANGGAL IMB
1	2	3	4
1	Jl. Datuak Badaro Nan Putih Desa Beringin Taluk Kecamatan Kuantan Tengah	Rp 52.178.439,00	PBG-140902-30062022-01 30 JUNI 2022
2	Tanjung Pauh desa Tanjung Pauh kecamatan Singingi Hilir	Rp 1.194.400,00	PBG-140902-23062022-01 23 JUNI 2022
3	Jl. Rustam S Abrus Desa Sungai Jering Kecamtan Kuantan Tengah	Rp 221.611,50	PBG-140902-28062022-02 28 JUNI 2022
4	Jl. Rustam S Abrus Desa Sungai Jering Kecamtan Kuantan Tengah	Rp 375.457,50	PBG-140902-28062022-03 28 JUNI 2022
5	Jl. Printis kemerdekaan Desa Simpang Tiga Kecamatan Kuantan Tengah	Rp 300.000,00	PBG-140902-08072022-01 08 JULI 2022

Sumber: Dinar PUPR Kabupaten Kuantan Singingi dan Hasil analisis 2022

Pada Bulan Juli tahun 2022 dinas PUPR kabupaten kuantan singingi merokemendasikan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dengan menggunakan aplikasi SIMBG dengan Jumlah 5 PBG, dengan rincian 4 PBG berada di Kecamatan kuantan tengah dan 1 PBG di Kecamatan Singingi Hilir.

Tabel Rekapitulasi Persetujuan bangunan Gedung (PBG) bulan Agustus Tahun 2022

NO	LOKASI	RETRIBUSI (RP)	NOMOR DAN TANGGAL IMB
1	2	3	4
1	Jl. Rustam S Abrus Desa Sungai Jering Kecamtan Kuantan Tengah	Rp 218.559,00	PBG-140902-02082022-02 02 AGUSTUS 2022
2	Jl. Rustam S Abrus Desa Sungai Jering Kecamtan Kuantan Tengah	Rp 218.559,00	PBG-140902-02082022-02 02 AGUSTUS 2022
3	Jl. Rustam S Abrus Desa Sungai Jering Kecamtan Kuantan Tengah	Rp 218.559,00	PBG-140902-02082022-04 02 AGUSTUS 2022
4	Jl. Rustam S Abrus Desa Sungai Jering Kecamtan Kuantan Tengah	Rp 525.030,00	PBG-140902-02082022-06 02 AGUSTUS 2022

5	Jl. Rustam S Abrus Desa Sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah	Rp 218.559,00	PBG-140902-02082022-05 02 AGUSTUS 2022
6	Jl. Soekarno Hatta Dusun Sukajadi Desa Muara Langsat Kecamatan Sentajo Raya	Rp 429.962,00	PBG-140914-05072022-01 25 JULI 2022
7	Jl. Tuanku Tambusai Desa Koto Taluk Kecamatan Kuantan Tengah	Rp 16.949.790,00	PBG-140902-31072022-01
			31 JULI 2022
8	Jl. Tuanku Tambusai Desa Koto Taluk Kecamatan Kuantan Tengah	Rp 16.640.910,00	PBG-140902-31072022-02 31 JULI 2022
9	Jl. Tuanku Tambusai Desa Koto Taluk Kecamatan Kuantan Tengah	Rp 16.640.910,00	PBG-140902-31072022-05 31 JULI 2022
10	Jl. RT/RW 002/001 Dusun Wanasari Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir	Rp 4.175.407,50	PBG-140908-08082022-01
			08 AGUSTUS 2022
11	Jl. Tuanku Tambusai Desa Koto Taluk Kecamatan Kuantan Tengah	Rp 1.071.680,00	PBG-140902-31072022-01 31 JULI 2022
12	Jl. Tuanku Tambusai Desa Koto Taluk Kecamatan Kuantan Tengah	Rp 20.888.010,00	PBG-140902-19082022-01 19 AGUSTUS 2022
13	Jl. Tuanku Tambusai Desa Koto Taluk Kecamatan Kuantan Tengah	Rp.12.545.775,00	PBG-140902-02082022-03 02 AGUSTUS 2022
14	Jl. Tuanku Tambusai Desa Koto Taluk Kecamatan Kuantan Tengah	Rp. 6.272.887,00	PBG-140902-02082022-01 02 AGUSTUS 2022
15	Jl. Tuanku Tambusai Desa Koto Taluk Kecamatan Kuantan Tengah	Rp 6.272.887,00	PBG-140902-31072022-06
			31 JULI 2022
16	Jl. Tuanku Tambusai Desa Koto Taluk Kecamatan Kuantan Tengah	Rp 25.091.550,00	PBG-140902-30082022-01
			30 AGUSTUS 2022

Sumber: Dinar PUPR Kabupaten Kuantan Singingi dan Hasil analisis 2022

Pada Bulan Agustus tahun 2022 dinas PUPR kabupaten kuantan singingi merokemendasikan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dengan menggunakan aplikasi SIMBG dengan Jumlah 16 PBG, dengan rincian 14 PBG berada di Kecamatan kuantan tengah,1 PBG di Kecamatan Singingi Hilir, 1 PBG di Kecamatan Sintajo Raya.

Tabel Rekapitulasi Persetujuan bangunan Gedung (PBG) bulan September Tahun 2022

NO	LOKASI	RETRIBUSI (RP)	NOMOR DAN TANGGAL PBG
1	2	3	4
1	Jl. Ahmad Yani kelurahan simpang tiga Desa simpang tiga Kecamatan Kuantan Tengah	Rp 8.414.653,00	PBG-140902-09092022-01 09 SEPTEMBER 2022
2	Jl. Poros Desa Seberang Cengar Kecamatan Kuantan Mudik	Rp 9.340.650,00	PBG-140901-26092022-01 26 SEPTEMBER 2022
3	Jl. Simpang Tiga Air Emas Desa Air Emas Kecamatan Singingi	Rp 429.962,00	PBG-140903-05042022-01 26 SEPTEMBER 2022
4	Jl. Jend Sudirman Desa Seberang Pantai Kecamatan Kuantan Mudik	Rp 9.922.027,00	PBG-140901-20092022-01 20 SEPTEMBER 2022

Sumber: Dinar PUPR Kabupaten Kuantan Singingi dan Hasil analisis 2022

Pada Bulan September tahun 2022 dinas PUPR kabupaten kuantan singingi merokemendasikan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dengan menggunakan aplikasi SIMBG dengan Jumlah 4 PBG, dengan rincian 1 PBG berada di Kecamatan kuantan tengah,1 PBG di Kecamatan Singingi, 2 PBG di Kecamatan Kuantan Mudik

Tabel Rekapitulasi Persetujuan bangunan Gedung (PBG) bulan Oktober Tahun 2022

NO	LOKASI	RETRIBUSI (RP)	NOMOR DAN TANGGAL PBG
1	2	3	4
1	Jl. Ahmad Yani Desa Koto Taluk Kecamatan Kuantan Tengah	Rp 16.714.269,00	PBG-140902-26092022-01 26 SEPTEMBER 2022
2	Jl. Poros H. Halim Dusun III Desa Seberang Cangar Kecamatan Kuantan Mudik	Rp 1.647.800,00	PBG-140901-03102022-01 23 OKTOBER 2022
3	Jl. Tuanku Tambusai Desa Koto Taluk Kecamatan Kuantan Tengah	Rp 7.633.197,00	PBG-140902-07102022-01 07 OKTOBER 2022

4	Jl. Tuanku Tambusai Desa Koto Taluk Kecamatan Kuantan Tengah	Rp 8.108.100,00	PBG-140902-06102022-01 06 OKTOBER 2022
5	Jl. Rusdi S Abrus Desa Sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah	Rp 221.611,00	PBG-140902-11102022-03 11 OKTOBER 2022
6	Jl. Rusdi S Abrus Desa Sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah	Rp 221.611,00	PBG-140902-11102022-02 11 OKTOBER 2022
7	Jl. Rusdi S Abrus Desa Sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah	Rp 221.611,00	PBG-140902-11102022-01 11 OKTOBER 2022

Sumber: Dinar PUPR Kabupaten Kuantan Singingi dan Hasil analisis 2022

Pada Bulan Agustus tahun 2022 dinas PUPR kabupaten kuantan singingi merokemendasikan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dengan menggunakan aplikasi SIMBG dengan Jumlah 7 PBG, dengan rincian 6 PBG berada di Kecamatan kuantan tengah,1 PBG di Kecamatan Kuantan Mudik

Tabel Rekapitulasi Persetujuan bangunan Gedung (PBG) bulan Oktober Tahun 2022

NO	LOKASI	RETRIBUSI (RP)	NOMOR DAN TANGGAL PBG
1	3	5	6
1	Jl. Kaharudin Nasution desa koto taluk Kecamatan Kuantan Tengah	Rp 5.855.305,00	PBG-140902-20112022-01 20 NOVEMBER 2022
2	Jl. Jend Sudirman Desa Pasar Usang Kecamatan Kuantan Hilir	Rp 3.125.000,00	PBG-140904-10112022-01 10 NOVEMBER 2022
3	Jl. Jend Sudirman Desa Pasar Usang Kecamatan Kuantan Hilir	Rp 3.125.000,00	PBG-140904-10112022-02 10 NOVEMBER 2022
4	Desa jake Kecamatan Kuantan Tengah	Rp 13.624.000,00	PBG-140902-220822-01 22 AGUSTUS 2022
5	Jl. Belibis Lk. I kelurahan Simpang Tiga, Desa Simpang Tiga Kecamatan Singingi	Rp 2.600.728,00	PBG-140902-281122-02 22 AGUSTUS 2022

6	Jl. Jend Sudirman RT.02 RW 08 Keluran Muara Lembu desa muara lembu kec singingi	Rp 27.851.750,00	PBG-140903-091122-02 22 AGUSTUS 2022
---	--	------------------	---

Sumber: Dinar PUPR Kabupaten Kuantan Singingi dan Hasil analisis 2022

Pada Bulan November tahun 2022 dinas PUPR kabupaten kuantan singingi merokemendasikan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dengan menggunakan aplikasi SIMBG dengan Jumlah 6 PBG, dengan rincian 3 PBG berada di Kecamatan kuantan tengah,1 PBG di Kecamatan Singingi Hilir, 2 PBG di Kecamatan Singingi.

5.KESIMPULAN

Dari hasil penelitian tentang Persetujuan bangunan Gedung dengan menggunakan Aplikasi SIMBG di Dinas PUPR Kabupaten Kuantan Singingi maka dapat di simpulkan sebagai berikut:

Dinas PUPR Kabupaten Kuantan Singingi Telah Mengeluarkan rekomendasi Persetujuan Bangunan Gedung dengan menggunakan aplikasi SIMBG pada tahun 2022 sebanyak 94 rekomendasi PBG dengan rincian di bulan Maret 5 PBG, bulan April 29 PBG, bulan Mei 5 PBG, bulan Juni 11 PBG, bulan Juli 5 PBG, bulan Agustus 16, bulan September 4 PBG, bulan Oktober 7 PBG, bulan Nopember 6 PBG, bulan Desember 5 PBG.

REFERENSI

- [1] Alfabet Sutedi, Adrian. 2010. Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik. Jakarta: Sinar Grafika
- [2] Badan Standarisasi Nasional, 2019, *Persyaratan Beton Struktural untuk Bangunan Gedung SNI 2847:2019*, Jakarta.
- [3] Badan Standarisasi Nasional, 1997, *Metode Pengujian Kuat Tekan Elemen Struktur Beton Dengan Alat Uji Palu Beton Type N dan NR, SNI 03-4430-1997*, Jakarta. Karundeng V., 2015, *Penerapan Metode Schmidt Hammer Test dan Core Drilled Test*
- [4] Mukarom Zaenal, Laksana Muhibudin Wijaya. 2015. Manajemen Pelayanan Publik. Jawa Barat: Pustaka Media
- [5] Ratminto & Atik Septi Winarsih. 2007. Manajemen Pelayanan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung:
- [6] Tjiptono, Fandy. 2012. *Service Managemen Mewujudkan Layanan Prima*. Yogyakarta: Andy Zubir, Ismail. 2000. *Zoning Regulation: Instrumen yang Diperlukan Dalam Rangka Reformasi Penataan Ruang*. Jakarta: BKPRN
- [7] Peraturan Menteri PU, 2007, *Tentang Pedoman Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Nomor 25/RT/M2007*.
- [8] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 *Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung*
- [9] Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja